

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan berpikir dan kesadaran manusia akan diri dan dunianya telah mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Era globalisasi telah menggiring bangsa ini ke dalam persaingan global yang semakin kompetitif dan membuka peluang bagi manusia untuk mencapai status dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Sebagai implikasinya bangsa Indonesia kemudian diperhadapkan pada perubahan-perubahan hampir disemua aspek kehidupan manusia akibat adanya sistem keterbukaan politik, ekonomi, sosial dan budaya karena semakin tidak jelasnya batasan regional.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya strategis pembangunan bangsa di tengah arus globalisasi. Upaya-upaya pembangunan hampir selalu merupakan padanan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdidik yang mampu mengikuti corak dan dinamika yang berkembang secara cepat dan mendunia. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan harus merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pendidikan merupakan hal yang urgen sebagai pilar pembangunan sebuah bangsa, sehingga yang menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional yaitu peningkatan

mutu pendidikan yang merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.

Masalah pendidikan di Indonesia saat ini adalah masih rendahnya mutu pendidikan. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional sangat menyadari tentang kenyataan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam buku Manajemen Berbasis Sekolah berikut ini: “salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan” (Depdiknas, 2003: 3-4).

Menurut Wiyono (2010: 184-185) ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. *Pertama*, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented* yang bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan output yang bermutu. *Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang

diproyeksikan ditingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah).

Sejak digulirkannya reformasi dan telah diundangkannya UU Otonomi Daerah yakni UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah segala peraturan dari yang bersifat sentralistik (*top down*) menjadi desentralisasi. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, demi membangun daerahnya masing-masing dengan mengakomodasi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Berlakunya undang-undang otonomi daerah tersebut tentunya memberikan kekuasaan dan kewenangan yang sangat luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai kewenangan yang diberikan, termasuk di dalamnya aspek pendidikan atau disebut juga dengan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan tidak hanya menyangkut pelimpahan wewenang birokrasi dari pusat ke daerah tingkat kabupaten/kota, melainkan juga mencakup otonomi pada tingkat lembaga pendidikan langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan yang dipertegas dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 pasal 51 yang menyatakan bahwa “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.

Model otonomi pendidikan ini salah satunya adalah yang disebut dengan *School Based Management* atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Hal ini ditandai dengan keberadaan otonomi luas di tingkat sekolah sehingga lebih bisa memenuhi aspirasi masyarakat setempat. Secara umum manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orangtua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi-fungsi yang didesentralisasikan ke sekolah dalam MBS ini adalah: a) perencanaan dan evaluasi; b) pengelolaan kurikulum; c) pengelolaan proses belajar mengajar; d) pengelolaan ketenagaan; e) pengelolaan fasilitas; f) pengelolaan keuangan; g) pengelolaan layanan siswa; h) pengelolaan hubungan sekolah-masyarakat; dan i) pengelolaan iklim sekolah (Depdiknas, 2003: 14-15).

Sejalan dengan hal tersebut lembaga pendidikan menengah SMAN 3 Gorontalo sudah mulai menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah sebagai otonomisasi yang luas pada level sekolah. Pengelolaan yang sebelumnya bersifat birokratik sentralistik menjadi desentralisasi melalui

penerapan MBS membawa perubahan struktur organisasi dalam skema pengelolaan sekolah di SMAN 3 Gorontalo. Sekolah diberikan kewenangan yang lebih luas di mana sebelumnya dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah amat bergantung prakarsa dan tuntutan dari atas yang serba juklak dan juknis.

MBS sebagai paradigma baru, sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya, di mana peranan pusat tidak mengontrol lagi, tetapi memotivasi dan dari mengarahkan ke memfasilitasi. Sebagai contoh manajemen kurikulum di SMAN 3 Gorontalo, di mana dalam implementasi kurikulum sekolah dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, memodifikasi) seperti pengembangan muatan lokal tapi tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional, sedangkan Diknas Kota Gorontalo bertugas melakukan monitoring atas implementasi kurikulum tersebut. Namun ada juga komponen MBS yang belum secara penuh pengelolaannya dilakukan oleh pihak sekolah yaitu pengelolaan biaya pendidikan yang sifatnya tidak otonomi penuh karena komponen ini masih merupakan tanggung jawab pihak pemerintah, sedangkan sekolah hanya berperan sebagai pengguna secara operasional dan pertanggungjawabannya secara administrasi, hal ini disebabkan karena pengelolaan komponen tersebut masih dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah dalam hal ini pihak dinas pendidikan.

Interaksi yang demokratis dalam kerangka MBS tergambar dari pelibatan masyarakat dan orang tua siswa dalam setiap pengambilan keputusan, seperti perumusan program yang tidak serta merta menjadi otoritas sekolah melainkan dimusyawarkan bersama orang tua siswa melalui rapat komite sekolah. Pihak sekolah juga senantiasa memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan yang telah berlangsung kepada masyarakat dan orang tua siswa sebagai bentuk transparansi dan akuntabel sehingga masyarakat dan orang tua siswa dapat menjalankan fungsi kontrol. Keterbukaan dalam pengelolaan sekolah di SMAN 3 Gorontalo juga dimaksudkan untuk membangun keyakinan dan kepercayaan *stakeholders*, namun kenyataannya kepedulian sebagian masyarakat untuk berperan serta masih sangat rendah, disebabkan masyarakat kurang peduli terhadap proses pendidikan dan mereka tidak mengetahui bentuk-bentuk dan cara berpartisipasi dalam bidang pendidikan.

Berangkat dari pemikiran di atas maka peneliti terdorong untuk mengetahui dan tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Gorontalo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

Penyelenggaraan pendidikan melalui MBS menyebabkan SMAN 3 Gorontalo secara mandiri mengelola dan mengatur sekolahnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan meliputi: manajemen organisasi sekolah, manajemen personel, manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana, manajemen kesiswaan, manajemen pembiayaan dan manajemen kehumasan.

Pengelolaan biaya pendidikan belum secara penuh dilakukan oleh pihak sekolah, karena komponen ini masih merupakan tanggung jawab pihak pemerintah (Diknas Kota); serta tingkat kepedulian sebagian masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka MBS masih sangat rendah, disebabkan masyarakat kurang peduli terhadap proses pendidikan dan mereka tidak mengetahui bentuk-bentuk dan cara berpartisipasi dalam bidang pendidikan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka dirumuskan masalah sebagai berikut: yaitu apakah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMAN 3 Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan yaitu untuk mengetahui apakah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMAN 3 Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Manfaat secara teoritik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khasanah ilmu pengetahuan serta kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti sejenis pada waktu yang akan datang terutama yang berkaitan dengan mutu pendidikan.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input bagi sekolah yang menjadi tempat penelitian kaitannya dalam pengembangan pendidikan yang berkualitas di era desentralisasi pendidikan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan pengambilan kebijakan di tingkat Kota sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah.